**ABSTRAK**

Judul Laporan Akhir ini ialah “**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DELEGATIF CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**”. Laporan Akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menganalisis bentuk pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat dalam meningkatkan pelayanan publik Di Kecamatan Labuan Amas Utara, memperoleh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan camat di kecamatan Labuan Amas Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desktiptif Kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode penelitan Deskriptif Kualitatif ialah metode yang menggunakan fakta, keadaan, kejadian yang terjadi saat peneliatan dilaksanakan dengan mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atau kurangnya pelaksanaan kewenangan camat ialah komunikasi. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi masih kurang komunikasi atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh kabupaten kepada Kecamatan. Sehingga aparat kecamatan masih bingung karena masih ada tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu pelayanan yang dikerjakan kecamatan dengan dinas UPTD.

Hasil dari analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah hal yang penting, baik untuk aparat kecamatan maupun untuk masyarakat. Faktor-faktor penghambat dari pelimpahan kewenangan camat adalah : (1) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah (2) Letak geografis dari Kantor kecamatan ke kabupaten (3) Kurangnya Evaluasi di setiap kegiatan. Adapun faktor-faktor pendukung dari pelimpahan kewenangan camat adalah : (1) adanya aparat kecamatan yang kompeten (2) adanya sistem pelayanan baru (PATEN) (3) Letak Kantor kecamatan dekat dengan desa, sehingga mudah di jangkau masyarakat.

Saran untuk kesimpulan diatas adalah pemerintah perlu meningkatkan pengarahan, sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati terhadap camat.

Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan, Delegatif

**ABSTRACT**

The title of this Final Report is “ **IMPLEMENTATION DELEGATIVE AUTHORITY HEAD OF DISTRICT IN IMPROVING PUBLIC SERVICE IN NORTH LABUAN AMAS DISTRICT HULU SUNGAI TENGAH REGENCY** “. This final report has goal to have a conception and analyze form of authority which being delegated from regent to the head of district in increasing public service at north Labuan Amas district, have a conception about factors which affect authority in North Labuan Amas district.

Method which being used in this research is qualitative descriptive method with inductive approach. Qualitative descriptive method is a method use fact, situation, events happened when research run and give real information. Data collecting technique are observation, interview, and documented.

Based on analyze and discussion known factors which affect or minus of head of district role is communication. Enforcement of authority abundance from regent to head of district have run well. But there are still misscommunication and less socialization done from regency to district. So staff of district office still confuse because of there is an overlap in running services done by district with Department of Technical Implementing Service Unit.

From result of analyze above we can conclude that communication is really important, even for staff or people. Factors can inhibit the authority abundance are : (1) Less of socialization by government (2) geographical location from district to regency (3) Less of evaluation in every activities. Factors can support the authority abundance are : (1) There are competence staffs (2) There is a new service system ( PATEN) (3) District office close with village so it could be reach easily by people.

Recommendation for conclusion above is government need to increase socialization and counseling which relate with authority abundance from regent to the head of district.

Key Word : Implementation, Authority , Delegative